ABSTRAK

KOMUNIKASI POLITIK FRAKSI PDI PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

(Studi Kasus Mengenai Komunikasi Politik Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Dalam Isu Pemekaran Tasikmalaya Selatan)

Oleh :

Kharisma Pramundari

NIM. 41813125

Skripsi ini dibawah bimbingan,

Dr. Eddy Syarif

Penelitian bermaksud untuk mengetahui Komunikasi Politik Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Dalam Isu Pemekaran Tasikmalaya Selatan.

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, studi pustaka, observasi, dan *internet searching*. Adapun teknik analisis data yang dilakukan, melalui beberapa tahap yaitu reduksi data, pengumpulan data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa setiap proses komunikasi yang terjadi dan terjalin antara berbagai pihak, dapat dipastikan oleh elit partai yang mana dapat disimpulkan cenderung bersifat elitis. Proses komunikasi politik yang terjadi antara fraksi dan masyarakat berjalan dengan baik dan dapat meredam permasalahan yang terjadi. Meskipun realitas yang terjadi saat ini belum terwujud tetapi prosesnya tetap berjalan ketika semua pihak berusaha agar pemekaran ini segera terwujud dan menjadi wilayah yang maju.

Kesimpulan penelitian yaitu bahwa komunikasi politik yang terjadi mengenai isu pemekaran masih berjalan dengan baik dan terus melakukan proses-proses yang dapat menggolkan pemekaran tersebut. Ketika masyarakat dengan

Fraksi selalu mendukung apa yang di inginkan masyarakat Tasikmalaya Selatan, disini pun Fraksi selalu berusaha membantu dan mendorong agar keinginan masyarakat Tasikmalaya Selatan dapat terwujud.

Saran yang dapat peneliti berikan, Fraksi PDI Perjuangan harus selalu menjadi komunikasi yang baik dengan masyarakat Tasikmalaya Selatan. Dan selalu mendorong dan membantu agar segera terwujudnya pemekaran daerah Tasikmalaya Selatan. Perlu diingat juga bahwa komunikasi merupakan jembatan untuk publik dan harus dapat meredamkan jika terjadi suatu konflik.

Kata Kunci : Komunikasi Politik, Proses, Realitas.

ABSTRACT

The research intends to know the Political Communication PDI-P Struggle of the House of Representatives of Tasikmalaya Regency in the Issue of Tekikmalaya South Pemekaran.

The research used qualitative method with case study approach. Data obtained through in-depth interviews, literature study, observation, and internet searching. The data analysis techniques performed, through several stages of data reduction, data collection, data presentation, conclusion drawing.

The results showed that every communication process that occurs and established between the various parties, can be ascertained by party elites which can be concluded tend to be elitist. The process of political communication that occurs between the faction and the community goes well and can reduce the problems that occur. Although the current reality is not yet realized but the process is still running when all parties try to make this division immediately realized and become a developed region.

The conclusion of the research is that the political communication that happened on the issue of pemekaran still running well and keep doing the process that can make the division. When the people with the Faction always support what the people of Tasikmalaya Selatan want, here too Faction always try to help and encourage the wishes of the people of South Tasikmalaya can be realized.

Suggestions that researchers can give, the PDI-P faction should always be a good communication with the people of South Tasikmalaya. And always encourage and help for the immediate realization of the division of Tasikmalaya Selatan region. Keep in mind also that communication is a bridge to the public and should be able to muffle if a conflict occurs.

***Keywords**: Political Communication, Process, Reality.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Isu Pemekaran Tasikmalaya Selatan terjadi karena adanya keinginan dari masyarakat yang melihat potensi daerah dan luas wilayah yang dimiliki dan dapat berkembang dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat . Pada tahun 2011 saat pemekaran kota Tasikmalaya ada dua opsi mengenai ibu kota yaitu antara lain Karangnunggal dan Singaparna. Masyarakat berharap agar ibu kota itu berada di daerah Karangnunggal.

Tetapi karena keputusan politis yaitu DPRD memilih suara terbanyak yaitu yang terpilih adalah Singaparna, maka masyarakat Tasikmalaya Selatan menjadi kecewa karena keputusan tersebut. Dari kekecewaan tersebut dan dari ketertinggalannya pembangunan yang kurang merata sehingga munculah keinginan dari masyarakat Tasikmalaya Selatan untuk memisahkan diri.

Pada saat itu ada kesepakatan membuat Presidium mengenai gerakan-gerakan pembentukan Kabupaten Tasikmalaya Selatan. Di periode 2004-2009 gerakan-gerakan tersebut yang akhirnya disetujui oleh DPRD. Terbentuknya Presidium Kabupaten Tasikmalaya Selatan murni atas aspirasi masyarakat.

Keinginan pemekaran ini bukan gertakan semata, tetapi benar-benar menjadi komitmen bersama tokoh masyarakat di dua belas kecamatan. Langkah yang tepat untuk mengejar ketertinggalan ini yaitu dengan membentuknya daerah otonomi baru, supaya akses terhadap pemerintahan dan pelayanan masyarakat bisa lebih

dekat. Seperti yang dikatakan diatas hal utama yang ingin diraih dengan membentuk otonomi baru adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat Tasikmalaya Selatan.

Menurut pra penelitian isu pemekaran ini memang sudah berlangsung sejak lama, tetapi momentumnya baru sekarang. Sehingga masyarakat Tasikmalaya Selatan pun beragumen bahwa Pemerintah Tasikmalaya tidak perlu sibuk dengan keinginan masyarakat Tasikmalaya Selatan. Hal ini disebabkan, soal pemekaran tersebut sudah diatur dalam undang-undang dan tentu saja berdasarkan tujuan mulia, yakni untuk meningkatkan kesejahteraan dan memudahkan pelayanan masyarakat selatan. Dengan berbagai proses yang dilakukan dan prosesnya sempat sedikit terhambat karena ada perubahan sebagaimana diatur dalam UU No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No 32 Tahun 2004 dan sesuai PP No 78 tahun 2007 tentang persyaratan pembentukan daerah otonomi Baru

Banyaknya pemekaran wilayah yang didorong oleh derasnya tekanan politik dan perebutan kekuasaan. Tekanan kuat dari daerah itu di respon positif oleh pemerintah pusat, padahal dalam taraf proses pemekaran tersebut setidaknya telah banyak memberikan beban terhadap pemerintah pusat. Beban yang fundamental adalah beban finansial penyelenggaraan pemerintahnya. Di setujuinya pemekaran wilayah dapat juga dimaknai bahwa akan adanya sebuah keharusan pemerintah pusat

untuk mengalirkan dana ke pemerintah daerah yang baru.

Dalam hal ini juga tentu saja ada aktor politik maupun partai politik yang berperan, misalnya saja pada salah satu Fraksi di DPRD Kabupaten Tasikmalaya yaitu Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Dengan demikian hal ini diharapkan mampu merekomendasikan kepada DPR dan Presiden tentang layak tidaknya sebuah calon daerah baru.

Fraksi PDI Perjuangan saat ini terus mengupayakan agar terget penyelesaian daerah otonomi baru bisa ditentukan. Dan membantu persiapan-persiapan yanng dilakukan selama pemekaran. Seperti yang harus disiapkan terlebih dahulu yaitu terutama dari segi infrastruktur dan fasilitas, terutama daerah-daerah perbatasan. Itu salah satu fasilitas pendukung yang utama Tasikmalaya Sealatan harus memiliki rumah sakit hingga universitas.

1.2. Rumusan Masalah

Pada penelitian ini, peneliti merinci secara jelas dan tegas dari fokus pada rumusan masalah yang masih bersifat umum dengan subfokus-subfokus terpilih dan dijadikannya sebagai rumusan masalah makro dan mikro, yakni :

1.2.1. Rumusan Masalah Makro

Bagaimana Komunikasi Politik Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tasikmalaya dalam Isu Pemekaran Tasikmalaya Selatan.

Untuk lebih fokusnya maka permasalahan dijelaskan pada rumusan masalah mikro di bawah ini :

1.2.1. Rumusan Masalah Mikro

Adapun pertanyaan penelitian yang diangkat berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas dalam penelitian ini antara lain berkenaan dengan :

1. Apa saja **Proses** Komunikasi Politik Fraksi PDI Perjuangan

DPRD Kabupaten Tasikmalaya dalam Isu Pemekaran Tasikmalaya Selatan?

2. Apa saja **Hambatan-hambatan** Komunikasi Politik Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tasikmalaya dalam Isu Pemekaran Tasikmalaya Selatan?
3. Bagaimana **Realitas** Komunikasi Politik Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tasikmalaya dalam Isu Pemekaran Tasikmalaya Selatan?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.3.1. Maksud Penelitian

Secara garis besar maksud penelitian ini adalah menghasilkan data kualitatif melalui metode studi kasus yang akan dijelaskan sesungguhnya, Komunikasi Politik Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tasikmalaya dalam Isu Pemekaran Tasikmalaya Selatan.

1.3.2. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui **Proses** Komunikasi Politik Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tasikmalaya dalam Isu Pemekaran Tasikmalaya Selatan
2. Untuk mengetahui **Hambatan-hambatan** Komunikasi Politik Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tasikmalaya dalam Isu Pemekaran Tasikmalaya Selatan
3. Untuk mengetahui **Realitas** Komunikasi Politik Fraksi PDI Perjuangan DPRD

Kabupaten Tasikmalaya dalam Isu Pemekaran Tasikmalaya Selatan

1.4. Kegunaan Penelitian

Merujuk pada tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan mencakup dua kegunaan penting bagi banyak pihak, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1.4.1. **Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis yang diperoleh dari penelitian ini adalah untuk menambah, mengembangkan khazanah bidang ilmu komunikasi terutama berkaitan dengan Kajian Komunikasi Politik. Dan juga nantinya dapat merangsang lahirnya penelitian lanjut dalam pembedahan kasus maupun objek yang berbeda.

1.4.2. Kegunaan Praktik

Kegunaan praktis yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berharga.

1. Untuk Peneliti

Adapun kegunaan penelitian ini bagi peneliti adalah meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dalam mempelajari displin ilmu komunikasi terkhususnya dalam kajian komunikasi politik.

2. Untuk Akademik

Adapun kegunaa penelitian ini bagi akademik diharapkan :

1) Dapat memberikan informasi yang berguna bagi pengembang dan menambah khazanah ilmu komunikasi, terutama berkaitan dengan Kajian Komunikasi Politik mengenaii Komunikasi Politik Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tasikmalaya sehingga mampu untuk membangun komunikasi politik sebagai kewajiban peneliti kualitatif, serta menjadi acuan bagi

pengembang ilmu komunikasi dalam perspektif lokalitas.

2) Memperkaya hasil-hasil penelitian komunikasi yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan tradisi stuudi kasus yang menggunakan perspektif komuniksi politik.
3) Sebagai bahan masukan yang berguna untuk peneliti selanjutnya dibidang yang sama atau yang ada hubungannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan pengembangan di bidang ilmu komunikasi atau komunikasi politik khususnya.

3. Untuk Instansi Terkait

Adapun kegunaan penelitian ini bagi instansi mendorong Fraksi PDI Perjuangan untuk tetap berperan aktif didalam kegiatan komunikasi politik. Serta dapat menjadi panutan bagi politisi-politisi yang lain khususnya Kabupaten Tasikmalaya Selatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Tinjauan Pustaka

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan mengenai penelitian ini, serta *study literature*, dokumen maupun arsip yang mendukung, yang menjadi pedoman pelaksanaan pra penelitian ini. Hal ini dilakukan guna memperkokoh bangunan penelitian yang berkaitan dengan Komunikasi Politik Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tasikmalaya (Studi Kasus Mengenai Komunikasi Politik Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kab. Tasikmalaya dalam Isu Pemekaran Tasikmalaya Selatan).

2.1.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Judul	Nama/Penyusun/Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Komunikasi Politik Paguyuban Pasundan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Studi Kasus Pada Pengurus Besar Paguyuban Pasundan Dalam Pemilihan Gubernur Secara Lansung di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008).	Adiyana Slamet (Tesis), Universitas Padjajaran, 2008. Metode Penelitian Kualitatif.	Hasil penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa PB. Paguyuban Pasundan dalam melakukakan proses komunikasi politik melalui dua tahap proses komunikasi politik Pengurus Besar Paguyuban Pasundan dalam pemilihan gubernur lansung Provinsi Jawa Barat Tahun 2008, Proses tahap pertama Paguyuban Pasundan	Perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu bagaimana proses dan realitas komunikasi politik yang dilakukan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tasikmalaya dalam Isu Pemekaran

			mengeluarkan keputusan politik melalui surat usulan anggota Dewan Pengaping Paguyuban Pasundan pada tanggal 26 September 2007 untuk dipertimbangkan sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat 2008 pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan, proses komunikasi politik tahap dua yaitu, keluarlah	Tasikmalaya Selatan.

			keputusan sikap politik Pengurus Besar Paguyuban Pasundan bahwa Paguyuban Pasundan bersikap netral dalam pemilihan gubernur Jawa Barat April 2008, pernyataan sikap politik ini disampaikan oleh wakil Dewan Pengaping Pengurus Besar Paguyuban Pasundan dalam konferensi persnya di seketariat Paguyuban Pasundan Jl.Sumatera No.41 Bandung.	

2.	Strategi Komunikasi Pemerintah Kabupaten Subang Untuk Menyosialisasikan Program "Gerakan Pembangunan Untuk Rakyat" (Studi Kasus Mengenai Strategi Komunikasi Pemerintahan Kabupaten Subang dalam Upaya Menyosialisasikan Program GAPURA INTAN (Gerakan Pembnagunan	Aulia Rahman (Tesis), Universitas Padjadjaran, 2016. Metode Penelitian Kualitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa infrastruktur merupakan permasalahan paling mendesak di Kab. Subang. Program ini bertujuan untuk menangani permasalan infrastruktur seperti salah satunya perbaikan jalan kabupaten yang rusak sehingga tidak bisa digunakan oleh masyarakat. Upaya pemerintah dalam mengkomunikasikan ini kepada masyarakat dengan cara hierarki pemerintah,	Perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu bagaimana proses dan realitas komunikasi politik yang dilakukan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tasikmalaya dalam Isu Pemekaran Tasikmalaya Selatan.

	Untuk Rakyat Infrastruktur Berkelanjutan)		menggunakan berbagai media seperti media cetak, elektronik hingga online dan menyosialisasikan kepada masyarakat secara langsung pada berbagai kesempatan yang ada. Masyarakat sudah tau program ini namun mereka berpendapat belum begitu merasakan dampaknya.	
3.	Proses Komunikasi Politik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Ahmad Zakiyuddin (TESIS), Universitas Padjadjaran, 2012. Metode Penelitian Kualitatif.	Hasil Penelitian ini mengungkapkan bahwa proses komunikasi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dalam	Perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu bagaimana

	(DPRD) Dalam Pengambilan Keputusan (Studi Kasus di DPRD Provinsi Jawa Barat)		pengambilan keputusan dilaksanakan melalui beberapa tahap sbb : Pertama, pada pembahasan tahap pertama ini Kepala Daerah atau pengusul Rancangan Peraturan Daerah selaku komunikator deberi kesempatan memberikan penjelasan (secara lisan atau tertulis) kepada Dewan tentang maksud usulan tersebut yang disampaikan dalam rapat paripurna. Kedua, Pemandangan umum anggota	proses dan realitas komunikasi politik yang dilakukan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tasikmalaya dalam Isu Pemekaran Tasikmalaya Selatan.

			DPRD dalam rapat paripurna oleh perwakilan masing-masing Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Gubernur. Ketiga, rapat bersama antara komisi/gabungan komisi atau panitia khusus dengan pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah guna membahas dan menyempurnakan rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas. Keempat, Pengambilan	

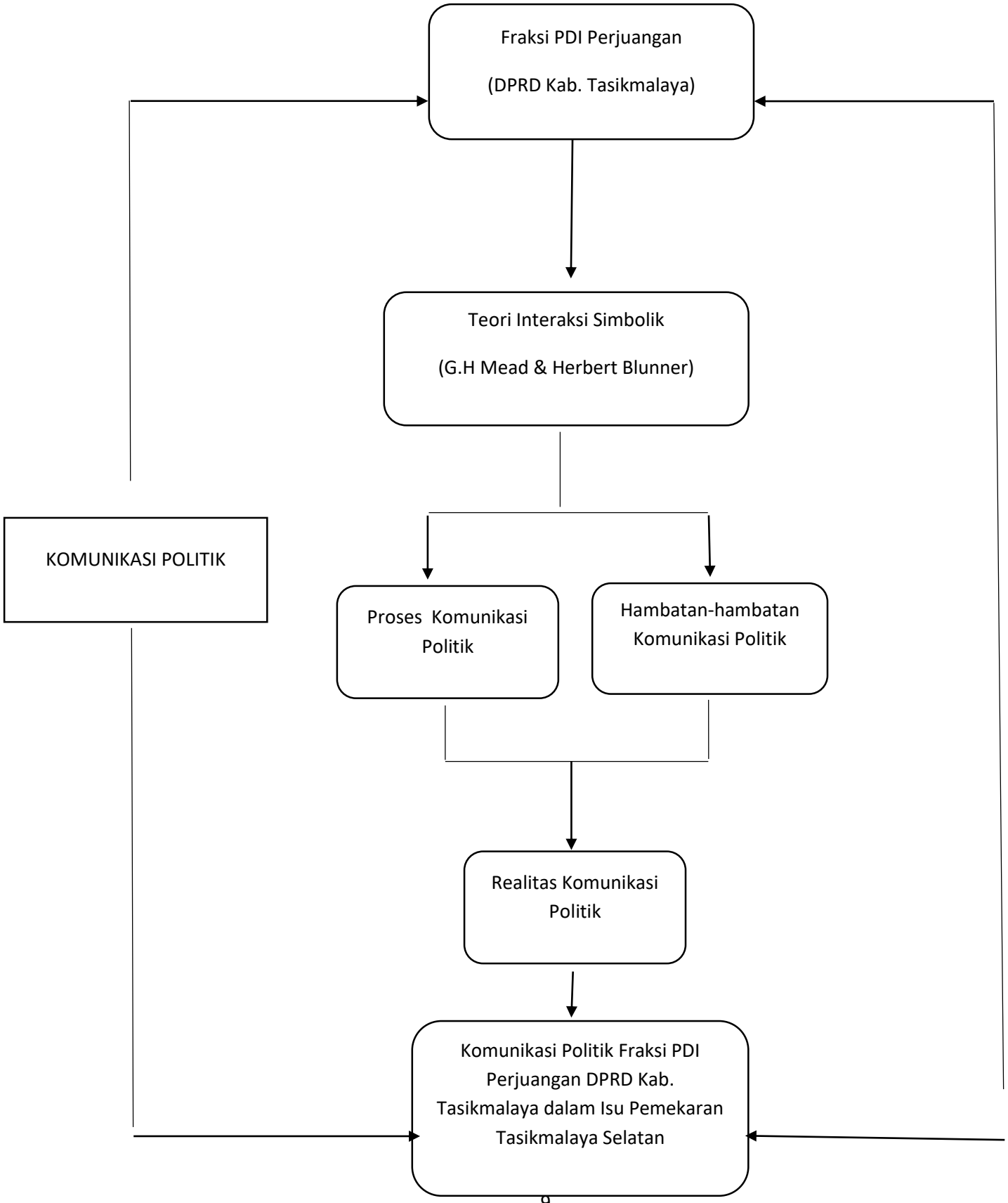
			keputusan dalam Rapat Paripurna, yang didahului dengan laporan hasil pembicaraan tahap III. Dan penyampaian pendapat akhir Fraksi oleh juru bicara Fraksi masing-masing. Proses komuniasi politik Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat belum maksimal. Hal tersebut di tandai dengan banyaknya raperda yang belum rampung diselesaikan, DPRD Jawa Barat hanya	

			menyetujui dua belas perda selama ini, walaupun merencanakan untuk membuatnya sekitar 31 raperda. Rendahnya intensitas komunikasi politik anggota DPRD dengan masyarakat. Selama ini komunikasi politik hanya dilakukan pada saat reses yang berlangsung 3 (tiga) kali dalam satu tahun. Untuk itu perlu adanya pemberdayaan komunikasi politik anggota DPRD Provinsi Jawa Barat	

			baik dalam menyerap aspirasi masyarakat maupun dalam proses pengambilan keputusan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.	

Sumber: Data Peneliti, 2017

Alur Model Kerangka Pemikiran/Metode Penelitian Kualitatif (Studi Kasus)



Sumber : Data Peneliti 2017

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Pada Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dimana untuk mengetahui dan mengamati segala hal yang menjadi ciri sesuatu hal. Menurut David Williams (1995) dalam Lexy Moleong menyatakan bahwa: "Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah". (Moleong, 2009 : 5)

Pengertian kualitatif lainnya, seperti yang diungkapkan oleh Denzin dan Lincoln (1987) dalam Lexy Moleong, menyatakan bahwa:

> "Penelitian kualitatif adalah penlitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada" dari segi pengertian ini, para penulis masih tetap mempersoalkan latar alamiah dengan maksud agar hasilnya dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena dan yang dimanfaatkan untuk penelitian kualitatif adalah berbagai macam metode penelitian. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen". (Moleong, 2009 : 5)

Definisi penelitian kualitatif menurut John W.Creswell dalam buku Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih Diantara Lima Pendekatan, bahwa:

> "Penelitian kualitatif dimulai dengan asumsi dan penggunaan kerangka penafsiran/teoritis yang membentuk atau mempengaruhi studi tentang permasalahan riset yang terkait dengan makna yang dikenakan oleh individu atau kelompok pada suatu permasalahan sosial atau manusia. Untuk mempelajari permasalahan ini, para penelitian kualitatif menggunakan pendekatan kualitatif mutakhir dalam

> penelitian, pengumpulan data dalam lingkungan alamiah yang peka terhadap masyarakat dan tempat penelitian dan analisis data yang bersifat induktif maupun deduktif dan pembentukan berbagai pola atau tema. Laporan atau presentasi tertulis akhir mencakup berbagai suara dari partisipan, refleksivitas dari penelitian, deskripsi dan interpretasi tentang masalah penelitian dan kontribusinya literatur atau seruan bagi perubahan". (Creswell, 2014 : 59)

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, mengacu pada John W.Creswell dalam bukunya Penelitian Kulitatif dan Desain Riset: Memilih Diantara Lima Pendekatan, bahwa studi kasus sebuah eksplorasi dari suatu sistem yang terikat atau suatu kasus/beragam kasus yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang kaya dalam suatu konteks. Sistem terikat ini diikat oleh waktu dan tempat sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu program, peristiwa, aktivitas atau suatu individu dan organisasi. Dengan perkataan lain, studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.

John W.Creswell membagi penelitian studi kasus dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Studi Kasus Instrumental Tunggal

Dalam studi kasus intrumental tunggal, peneliti memfokuskan pada isu atau persoalan, kemudian memilih

satu kasus terbatas untuk mengilustrasikan persoalan ini.

2. Penelitian Studi Kasus Kolektif

Studi kasus kolektif atau jamak, satu isu atau persoalan juga dipilih, tetapi peneliti memilih beragam studi kasus untuk mengilustrasikan isu atau persoalan tersebut. Peneliti juga dapat mempelajari satu program dari beberapa tempat riset atau beragam program di satu tempat tertentu.

3. Penelitian Studi Kasus Intrinsik

Studi kasus instrinsik yang fokusnya adalah pada kasus itu sendiri karena kasus tersebut menghadirkan situasi yang tidak biasa dan unik. Hal ini menyerupai fokus riset naratif, tetapi prosedur analisis studi kasus untuk deskripsi detail tentang kasus tersebut, yang disusun dalam konteksnya atau lingkungannya, tetap benar.

Selanjutnya John W.Creswell mengungkapkan bahwa apabila kita akan memilih studi untuk suatu kasus, dapat dipilih dari beberapa program studi atau sebuah program studi dengan menggunakan berbagai sumber informasi yang meliputi observasi, wawancara, materi audio-visual, dokumentasi dan laporan. Konteks kasus dapat "mensituasikan" kasus di dalam settingnya yang terdiri dari setting fisik maupun setting sosial, sejarah atau setting ekonomi. Sedangkan fokus di dalam suatu kasus dapat dilihat dari keunikannya, memerlukan suatu studi (studi kasus intrinsik) atau dapat pula menjadi suatu isu (isu-isu) dengan menggunakan kasus sebagai instrumen untuk menggambarkan isu tersebut (studi kasus instrumental). Ketika suatu kasus diteliti lebih dari satu kasus hendaknya mengacu pada

studi kasus kolektif. Untuk itu Lincoln Guba mengungkapkan bahwa struktur studi kasus terdiri dari masalah, konsteks, isu dan pelajaran yang dipelajari.

Studi kasus yang digunakan dalam Penelitian ini adalah studi kasus Intrinsik, Peneliti hanya memfokuskan pada kasus komunikasi politik fraksi PDI Perjuangan dalam isu pemekaran Tasikmalaya Selatan itu sendiri dan memandang bahwa kasus atau persoalannya tidak biasa dan unik. Ketidakbiasaanya atau keunikan Peneliti melihat dari proses kasus atau persoalaan yang menghambat isu pemekaran tersebut. Disini peneliti akan melihat bagaimana komunikasi politik Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tasikmalaya dalam Isu Pemekaran Tasikmalaya Sealatan..

Studi Kasus merupakan suatu cara bagi peneliti untuk menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan serta untuk melakukan komunikasi dengan subjek penelitian dalam kerangka konstruktivisme. Paradigma Konstruktisme Sosial menurut Creswell dalam buku Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih Diantara Lima Pendekatan, bahwa:

> "Dalam Konstruktivisme Sosial, individu-individu berusaha memahami dunia tempat mereka hidup dan bekerja. Mereka mengembangkan makna-makna subjektif dari pengalaman mereka–makna-makna yang diarahkan pada benda atau objek tertentu. Makna-makna ini beragam, mendorong sang peneliti untuk lebih mencari beragam pandangan daripada mempersempit makna-makna tersebut menjadi sejumlah kecil kategori atau ide. Tujuan dari penelitian tersebut, dengan demikian, adalah untuk bersandar sebanyak mungkin pada pandangan dari para partisipan tentang sitsuai tertentu. Sering kali makna-makna subjektif ini dinegosiasikan secara sosial

> dan historis. Dengan kata lain, mereka tidak sekadar diletakan pada individu-individu, tetapi dibentuk melalui interakasi dengan yang lain (dari sinilah pembentukan kehidupan sosial) dan mulai norma-norma historis dan kultural yang berlaku dalam kehidupan individu-indivdu tersebut. Daripada memulai dengan sebuah teori (sebagimana dalam postpositivisme), para peneliti menciptakan atau secara induktif mengembangkan teori atau pola makna." (Creswell, 2014 : 32)

Creswell menjelaskan, dalam praktiknya, pertanyaan wawancara yang diajukan peneliti kontruktivis sering kali luas dan umum, sehingga para partisipan dapat mengkrontruksi makna dari situasi, makna yang terbentuk dalam diskusi atau interaksi dengan orang lain. Semakin terbukanya pertanyaannya akan semakin baik, diman peneliti mendengarkan secara seksama apa yang dikatakan atau dilakuakn oleh masyarakat dalam kehidupan mereka. Maka dari itu, para peneliti konstruktivis sering kali berfokus pada "proses" interaksi diantara individu. Mereka juga berfokus pada konteks spesifik dimana masyarakat hidup dan bekerja dalam rangka untuk memahami latar belakang sejarah dan kebudayaan para partisipan. Para peneliti mengakui bahwa latar belakang mereka ikut mempengaruhi penafsiran mereka, dan mereka "memosisikan diri mereka" dalam riset tersebut untuk mengakui bagaimaa penafsiran tentang apa yang mereka temukan, penafsiran yang dipengaruhi oleh pengalaman dan latar belakang mereka. Tujuannya, dengan demikian, adalah untuk memaknai (atau menafsirkan) makna yang disampaikan orang lain tentang dunia. Hal ini mengapa penelitian kualitatif sering disebut riset "interpretatif".

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian

Objek penelitian adalah objek yang diteliti dan di analisis. Dalam penelitian ini, lingkup objek penelitian yang ditetapkan penulis sesuai dengan permasalahan yang akan di teliti adalah mengenai Komunikasi Politik Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Dalam Isu Pemekaran Tasikmalaya Selatan.

Hasil penelitian ini peneliti peroleh melalui proses hasil wawancara dan observasi langsung dilapangan, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan disepakati untuk selanjutnya melakukan wawancara dengan informan.

Untuk pada tahap analisis, yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat daftar pertanyaan untuk proses wawancara, pengumpulan data, dan analisis data yang dilakukan sendiri oleh peneliti. Untuk dapat mengetahui sejauhmana informasi yang diberikan oleh informan penelitian, peneliti menggunakan beberapa tahap :

1. Pertama, melakukan observasi melalui pra penelitian yang berlangsung di lapangan.
2. Kedua, menyusun draft pertanyaan yang akan digunakan dalam proses wawancara berdasarkan komunikasi politik yang akan ditanyakan kepada narasumber atau informan.
3. Ketiga, melakukan wawancara dengan informan yang merupakan anggota fraksi PDI Perjuangan dan tokoh masyarakat.

4. Keempat, melakukan dokumentasi langsung dilapangan untuk data-data yang berhubungan dengan penelitian ini.
5. Kelima, memindahkan data penelitian yang berbentuk daftar dari semua pertanyaan yang diajukan kepada narasumber atau informan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada Fraksi PDI Perjuangan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Proses Komunikasi Politik Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Selatan

Bahwa setiap proses komunikasi yang terjadi dan terjalin antara berbagai pihak, dapat dipastikan diprakrasai oleh elit partai yang mana dapat disimpulkan cendrung bersifat elitis. Proses komunikasi politik yang terjadi antara fraksi dan masyarakat berjalan dengan baik sesuai harapan masyarakat dan dapat meredam permasalahan yang terjadi.

Dalam hal ini komunikasi politik menjadi peran yang sangat sentral dalam memainkan setiap pengambilan keputusan yang menentukan sikap politik.

5.1.2 Hambatan-hambatan Komunikasi Politik Fraksi PDI Perjuangan DPRD

Kabupaten Tasikmalaya Dalam Isu Pemekaran Tasikmalaya Selatan

Saat ini sedang berlangsungnya moratorium dan belum dicabut sehingga prosenya sedikit terhambat. Tetapi, meskipun sedang diberhentikan tetapi tidak membuat masyarakat Tasikmalaya Selatan ini berhenti untuk mewujudkan agar tasikmalaya selatan ini lebih maju.

5.1.3 Realitas Komunikasi Politik Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Dalam Isu Pemekaran Tasikmalaya Selatan

Realitas yang terjadi saat ini memang belum terwujud karena adanya kendala bahwa pemekaran ini sedang diberhentikan sementara, tetapi prosesnya tetap berjalan ketika semua berusaha agar pemekaran ini segera terwujud dan menjadi wilayah yang maju.

5.2 Saran

Dalam sebuah penelitian, seorang peneliti harus mampu memberikan suatu masukan berupa saran-saran yang bermanfaat yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun saran-saran yang peneliti berikan setelah meneliti permasalahan ini adalah :

5.2.1. Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Adapun penelitian menyelesaikan pembahasan skripsi ini, maka pada bab penutup peneliti mengemukakan saran-saran sesuai dengan hasil pengamatan dalam pembahasan skripsi ini.

1. Bahwa komunikasi merupakan jembatan dan dapat meredamkan jika terjadi suatu konflik.

   .

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pemikiran dan kajian bagi Fraksi PDI Perjuangan dan juga masyarakat Tasikmalaya Selatan supaya terus berusaha sampai pemekaran Tasela ini terwujud.
3. Mencegah kegagalan dalam proses komunikasi dalam ruang politik, maka individu politik harus saling memahami bahwa perbedaan kepentingan dan pemikiran, untuk itu, komunikasi politik yang intens serta komunikasi politik yang *soft* mampu memotong ketidak sepahaman tersebut.

5.2.2. Saran Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya, disarankan untuk mencari dan membaca referensi lain lebih banyak lagi sehingga hasil penelitian selanjutnya akan semakin baik serta dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang baru.
2. Untuk para peneliti selanjutnya, disarankan agar meningkatkan lagi ketelitian saat mengerjakan skripsi baik dari kelengkapan data harus diperoleh dari apa yang akan diteliti untuk banyak lagi persiapan agar penelitiannya berjalan dengan lancar.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yakni dalam program studi ilmu komunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ardianto, Elvinaro dan Bambang Q-Aness. 2007. *Filsafat Ilmu Komunikasi*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Arifin, Anwar. 2003 *Komunikasi Politik (Paradigma, Teori, Aplikasi, Strategi Komunikasi Politik Indonesia)*. Jakarta : PT. Balai Pustaka.

Bagir, Zainal Abidin, 2011, *Pluralisme Kewargaan, Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia*, Mizan dan CRCS. Bandung-Yogyakarta.

Budiarjo, Miriam.2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 2008. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Umum.

Cangara, Hafied. *Komunikasi Politik*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2004.

Castells, Manuel, 2010. *The Power of Identity*. Oxford, UK:Blackwell Publishing Ltd.

----------. 2003. *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed method approaches (2nd ed.).* Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications.

----------. 2014. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih diantara lima pendekatan.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Effendy, Onong Uchana. 2006. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Hikmat, Mahi M. 2010. *Komunikasi Politik: Teori dan Praktik*. Bandung : Simbiosa Rekatama Media.

Kantaprawira, Rusadi. 2002. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung : Sinar Baru Aigensindo.

Kuswarno, Engkus, 2009. *Metode Penelitian Komunikasi, Fenomenologi, Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitian.* Bandung : Widya Padjajaran.

Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna (Indonesian Edition)*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Moleong, Lexy J., 2002. *Metodelogi Penelitian Kualitatif,*

Bandung, PT. Remaja Rosda Karya.

Muhtadi, Asep Saeful., 2004. *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama: Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif,* Penerbit Pustaka LP3ES, Jakarta.

Mulyana, Deddy. 2001. *Metodelogi Penelitian Kualitatif. Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya,* Bandung, Rosda Karya.

----------. 2007. *Metode Penelitian Komunikasi: Contoh-contoh Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Praktis.* Bandung: Remaja Rosdakarya

----------. 2013. *Komunikasi Politik Politik Komunikasi.* Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Nimmo, Dan. 2006. *Komunikasi Politik Komunikator, Pesan dan Media*. Bandung : PT : Remaja Rosdakarya.

----------. 2006. *Komunikasi Politik Khalayak dan Efek*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Rakhmat, Jalaluddin. 2007. *Metode Penelitian Komunikasi,* Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND.* Bandung, Alfabeta, 2010.

Karya Ilmiah / Jurnal

Rahman, Aulia. Strategi Komunikasi Pemerintah Kabupaten Subang Untuk Menyosialisasikan "Program Gerakan Pembangunan Untuk Rakyat" (Studi Kasus Mengenai Strategi Komunikasi Pemerintahan Kabupaten Subang dalam Upaya Menyosialisasikan Program GAPURA INTAN (Gerakan Pembnagunan Untuk Rakyat Infrastruktur Berkelanjutan). Bandung. Tesis. Program Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran (Unpad).

Slamet, Adiyana. *Komunikasi Politik Paguyuban Pasundan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Studi Kasus Pada Pengurus Besar Paguyuban Pasundan Dalam Pemilihan Gubernur Secara Langsung di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008).* Bandung. Tesis. Program Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran (Unpad).

Zakiyuddin, Ahmad. *Proses Komunikasi Politik Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Dalam Pengambilan Keputusan (Studi Kasus di DPRD Provinsi Jawa Barat).* Bandung. Tesis. Program Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran (Unpad).

Sumber lain

Bahan Ajar Komunikasi Politk oleh Adiyana Slamet, S.IP., M.SI. Program Studi Ilmu Komunikasi. Bandung : Unikom.

Undang-Undang / Peraturan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (1) tentang Pemekaran Wilayah

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2) tentang Pemekaran Wilayah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pembentukan daerah